



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 31 TAHUN 2011

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852) Pasal 10 sampai dengan 19 yang telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2010.**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 21.885.265.876,29
b. Dana Perimbangan	Rp. 764.614.725.727,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. <u>122.516.639.609,00</u>
Jumlah pendapatan	Rp. 909.016.631.212,29
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 504.642.072.128,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja Hibah	Rp. 29.306.744.409,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 12.757.545.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 71.046.750,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 60.723.398.998,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. <u>366.050.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 607.866.857.285,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 34.743.025.317,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 150.611.963.927,00
3) Belanja Modal	Rp. <u>126.174.115.544,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp. <u>311.529.104.788,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 919.395.962.073,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (10.379.330.860,71)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 102.693.920.155,31,00
b. Pengeluaran	Rp. <u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 100.693.920.155,31
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp. 90.314.589.294,60

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Lampung Timur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati Lampung Timur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lampung Timur ini.

Pasal 6

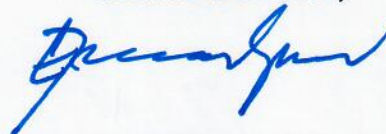
Peraturan Bupati Lampung Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	✓
2.	ASS. I	✓
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	KADIS PPKAD	✓
6.	BAG. HKM	✓
7.		
8.		

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal : 19 Desember 2011

**Pt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,**



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 19 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011, NOMOR : 31


LAPORAN REALISASI ANGGARAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

1.




Nomor Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN DAERAH	866.647.961.042,00	909.016.631.212,29	42.368.670.170,29	(42.368.670.170,29)	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.000.000.000,00	21.885.265.876,29	1.885.265.876,29	(1.885.265.876,29)	
4.1.1.	Pajak Daerah	7.524.775.000,00	10.712.600.403,61	3.187.825.403,61	(3.187.825.403,61)	
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	4.771.054.325,00	4.000.851.325,00	(770.203.000,00)	770.203.000,00	
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	750.000.000,00	1.081.836.711,30	331.836.711,30	(331.836.711,30)	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.954.170.675,00	6.089.977.436,38	(864.193.238,62)	864.193.238,62	
	DANA PERIMBANGAN	725.828.864.242,00	764.614.725.727,00	38.785.861.485,00	(38.785.861.485,00)	
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	105.814.398.242,00	144.600.259.727,00	38.785.861.485,00	(38.785.861.485,00)	
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	543.770.666.000,00	543.770.666.000,00	-	0,00	
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	76.243.800.000,00	76.243.800.000,00	-	0,00	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	120.819.096.800,00	122.516.639.609,00	1.697.542.809,00	(1.697.542.809,00)	
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.247.500.000,00	24.389.194.000,00	2.141.694.000,00	(2.141.694.000,00)	
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	98.571.596.800,00	98.127.445.609,00	(444.151.191,00)	444.151.191,00	
	JUMLAH	866.647.961.042,00	909.016.631.212,29	42.368.670.170,29	(42.368.670.170,29)	
	BELANJA	1.067.224.594.006,00	919.395.962.073,00	147.828.631.933,00	147.828.631.933,00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	722.435.820.232,00	607.866.857.285,00	114.568.962.947,00	114.568.962.947,00	
5.1.1.	Belanja Pegawai	601.801.217.082,00	504.642.072.128,00	97.159.144.954,00	97.159.144.954,00	
5.1.4.	Belanja Hibah	36.902.760.000,00	29.306.744.409,00	7.596.015.591,00	7.596.015.591,00	
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	15.221.743.500,00	12.757.545.000,00	2.464.198.500,00	2.464.198.500,00	
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	107.150.000,00	71.046.750,00	36.103.250,00	36.103.250,00	
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	67.402.949.650,00	60.723.398.998,00	6.679.550.652,00	6.679.550.652,00	
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	366.050.000,00	633.950.000,00	633.950.000,00	
	BELANJA LANGSUNG	344.788.773.774,00	311.529.104.788,00	33.259.668.986,00	33.259.668.986,00	
5.2.1.	Belanja Pegawai	38.753.616.000,00	34.743.025.317,00	4.010.590.683,00	4.010.590.683,00	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.193.425.524,00	150.611.963.927,00	12.581.461.597,00	12.581.461.597,00	
5.2.3.	Belanja Modal	142.841.732.250,00	126.174.115.544,00	16.667.616.706,00	16.667.616.706,00	
	JUMLAH	1.067.224.594.006,00	919.395.962.073,00	147.828.631.933,00	147.828.631.933,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(200.576.632.964,00)	(10.379.330.860,71)	(190.197.302.103,29)	(190.197.302.103,29)	
	PEMBIAYAAN	200.576.632.964,00	100.693.920.155,31	99.882.712.808,69	99.882.712.808,69	
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	203.076.632.964,00	102.693.920.155,31	100.382.712.808,69	100.382.712.808,69	
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	102.693.920.155,31	102.693.920.155,31	-	0,00	
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	92.076.112.360,69	-	92.076.112.360,69	92.076.112.360,69	
6.1.6.	Penerimaan piutang daerah	8.306.600.448,00	-	8.306.600.448,00	8.306.600.448,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	203.076.632.964,00	102.693.920.155,31	100.382.712.808,69	100.382.712.808,69	
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	90.314.589.294,60	(90.314.589.294,60)	(90.314.589.294,60)	

Pt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI



ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	KADIS PPKAD	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2010
 PERIODE BULAN : DESEMBER

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	496.916.765.800,00	424.962.572.460,00	71,954,193,340.00	86 %	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	425.010.802.800,00	363.671.265.105,00	61,339,537,695.00	86 %	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	425.010.802.800,00	363.671.265.105,00	61,339,537,695.00	86 %	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	351.847.206.000,00	311.784.227.685,00	40,062,978,315.00	89 %	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	263.403.144.000,00	234.216.590.934,00	29,186,553,066.00	89 %	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	26.274.521.000,00	23.191.249.192,00	3,083,271,808.00	88 %	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	565.812.000,00	506.790.000,00	59,022,000.00	90 %	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	39.415.100.000,00	34.059.896.999,00	5,355,203,001.00	86 %	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.451.112.000,00	1.175.515.000,00	275,597,000.00	81 %	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	13.736.265.000,00	12.189.360.600,00	1,546,904,400.00	89 %	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.995.362.000,00	6.440.291.369,00	555,070,631.00	92 %	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	5.890.000,00	4.533.591,00	1,356,409.00	77 %	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	73.163.596.800,00	51.887.037.420,00	21,276,559,380.00	71 %	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Sertifikasi)	58.686.496.800,00	29.904.537.420,00	28,781,959,380.00	51 %	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.090.000,00	40.090.000,00	0.00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.810.000,00	1.810.000,00	0.00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.810.000,00	1.810.000,00	0.00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0.00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0.00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0.00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0.00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.580.000,00	33.580.000,00	0.00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	9.900.000,00	0.00	100 %	
2.06.2.07.01.18.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.680.000,00	23.680.000,00	0.00	100 %	
	JUMLAH BELANJA	2.752.874.682,00	2.222.577.208,00	530.297.474,00	81 %	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.752.874.682,00)	(2.222.577.208,00)	(530.297.474,00)	81 %	

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	KADIS PPKAD
6.	BAG. HKM
7.	
8.	

PI. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI


ERWIN ARIFIN